

BAB 1

PENDAHULUAN

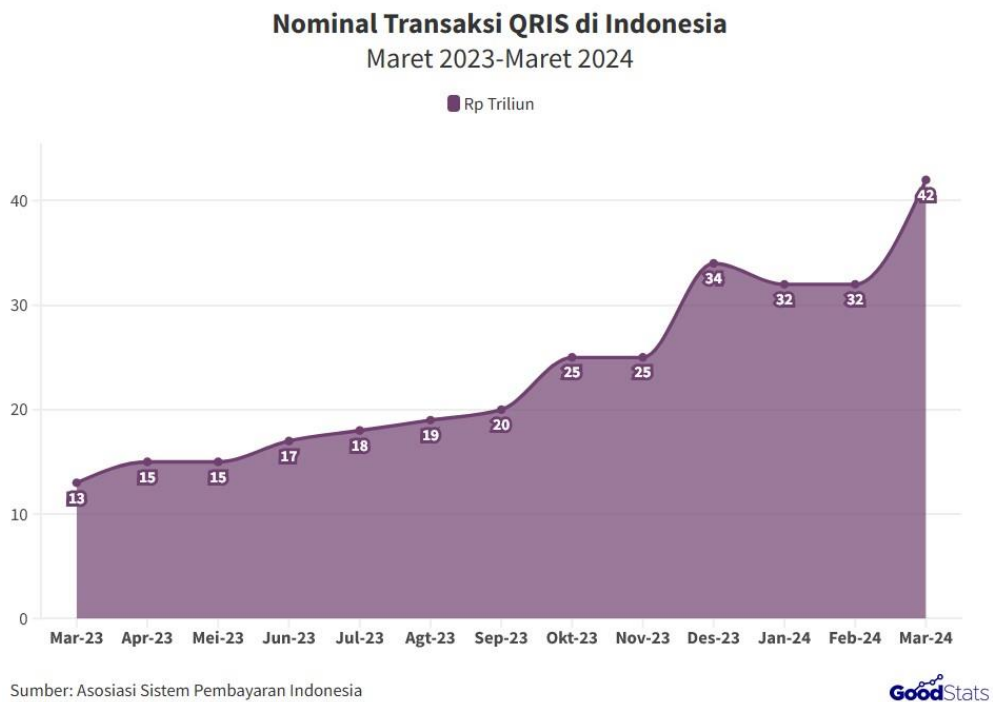
1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini semakin mempermudah pengumpulan informasi dan pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif. Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga mulai merambah ke wilayah pedesaan. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong implementasi sistem pembayaran non-tunai demi mewujudkan efisiensi ekonomi nasional, inklusi keuangan, serta mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran turut mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui berbagai inovasi salah satunya adalah peluncuran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang termasuk kebijakan Bank Indonesia. Diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 agar proses transaksi pembayaran secara domestic menggunakan QR code dapat lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. Diresmikan penggunaannya secara nasional pada 1 Januari 2020. QRIS kini menjadi salah satu pilar dalam kebijakan sistem pembayaran nasional bersama dengan inovasi lainnya seperti *BI-Fast*, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan sistem pembayaran berbasis digital banking. Aplikasi QRIS ini merupakan kode QR yang diterbitkan Bank Indonesia dan sudah distandarisasi sehingga dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran berbasis kode QR seperti *OVO*, *GoPay*, *LinkAja*, *DANA*, *Shopeepay* dan maupun mobile banking lainnya. QRIS dihadirkan untuk mempercepat inklusi keuangan, mempermudah transaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan unit ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan QRIS, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan efisien,

QRIS menjadi langkah penting menuju digitalisasi sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, nominal transaksi QRIS terus mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai rekor tertinggi pada Maret 2024 sebesar Rp 42 triliun.



Gambar 1. 1 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS

Sumber: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

QRIS telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2024, nominal transaksi QRIS mencapai Rp 42 triliun, meningkat 175,44% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah pengguna mencapai 48,12 juta dan jumlah merchant 31,61 juta. Peningkatan ini mencerminkan adopsi yang luas dari QRIS di berbagai sektor, termasuk di pedesaan, yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong *inklusi* keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran.

Menurut Maulana (2020) ; Wirawan (2021) dalam M. Sukarna, QRIS sebagai sistem pembayaran berbasis teknologi yang marak saat ini, kemungkinan besar memiliki risiko terkait keamanan dan privasi dalam transaksi digital. Salah satu potensi yang dapat timbul adalah *fraud* atau kecurangan yang dapat terjadi

dalam transaksi digital. Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja serta dimana saja sesuai dengan konsep *Fraud triangle* yaitu kemungkinan adanya *fraud* (kecurangan) dipengaruhi oleh *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (kesempatan), dan *Rationalization* (Rasionalisasi). Dengan meningkatnya penggunaan QRIS, muncul juga berbagai tantangan terkait keamanan dan privasi dalam transaksi digital. Serangan siber seperti *phishing*, penggantian kode QR, dan pencurian data pribadi telah menjadi ancaman yang semakin sering terjadi dalam ekosistem pembayaran digital. Di sisi lain tidak semua masyarakat daerah khusus nya untuk pengelolaan BUMDes memiliki literasi digital dan keuangan yang memadai, sehingga potensi kerentanan terhadap penipuan semakin besar. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana penerapan penggunaan QRIS serta bagaimana cara mencegah kecurangan dalam implementasinya.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bahwa keamanan digital tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada institusi yang mengelola transaksi, seperti BUMDes. Sebagai lembaga ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes kerap kali belum memiliki sistem keamanan digital yang memadai. Kurangnya edukasi dan pemahaman terkait sistem pembayaran digital juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi terjadinya *fraud*. Kesalahan dalam pengelolaan transaksi, ketidaktahuan akan modus penipuan digital, hingga minimnya prosedur pengamanan data menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi, agar penggunaan QRIS dapat berjalan dengan optimal dan tidak menjadi celah baru dalam tindak penipuan.

Selain *phishing* dan penggantian kode QR, risiko *fraud* yang sering terjadi dalam penggunaan QRIS antara lain adalah penyalahgunaan data transaksi, manipulasi sistem oleh pihak internal, dan pencurian akun dompet digital. Modus-modus tersebut kerap tidak disadari oleh pengguna, terutama di lingkungan yang belum terbiasa dengan keamanan digital. Menurut laporan dari Bank Indonesia dan OJK, pada tahun 2022 terdapat peningkatan laporan kejahatan *siber* dalam transaksi digital sebesar 32%, yang sebagian besar berasal dari sektor keuangan mikro dan usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS memudahkan

transaksi, tetap ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman pelaku ekonomi di desa terhadap praktik keamanan siber, seperti pentingnya verifikasi dua langkah, pembaruan aplikasi, dan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan. Bagi BUMDes, risiko ini tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang sedang dibangun.

Beberapa BUMDes yang telah mulai menerapkan QRIS dalam transaksi keuangannya yang menjadi fokus kini adalah BUMDes Kuala Alam yang terletak di Jalan Bathin Alam, Kabupaten Bengkalis, Riau. Serta, BUMDes Sebauk yang terletak di Desa Sebauk, Kabupaten Bengkalis, Riau. Berdasarkan keterangan direktur BUMDes Kuala Alam, BUMDes sudah menggunakan QRIS sejak tahun 2023, karena merasa QRIS cukup memudahkan proses transaksi yaitu dengan cepat dan mudah. BUMDes ini bergerak dalam berbagai bidang usaha yang mendukung kebutuhan masyarakat desa, seperti unit Perkebunan, unit perdagangan dan jasa, dan unit simpan pinjam. Berdiri pada November 2015, BUMDes Kuala Alam didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan aset desa dan pengembangan usaha masyarakat. Khususnya di unit perdagangan dan jasa, BUMDes Kuala Alam memiliki beberapa produk buatan sendiri yang diantaranya, stick nanas, stick ikan, gula nipah cair, serta terasi praktis. Kemudian, khusus jasa nya menjalankan jasa wifi. BUMDes ini juga berperan dalam mendorong kemandirian desa serta memperkuat perekonomian lokal di tingkat desa melalui berbagai kegiatan yang dikelola secara profesional. Bagian BUMDes kuala alam sudah terstruktur sesuai dengan bagiannya. Dengan fokus yang kini di ampu di unit perdagangan dan jasa karna berkaitan dengan transaksi yang melibatkan aktivitas QRIS.

Kemudian, untuk BUMDes Sebauk sendiri berdasarkan keterangan pengelola BUMDes Sebauk, BUMDes Sebauk berdiri pada tahun 2015, dengan berbagai unit yang dimiliki diantaranya unit simpan pinjam mufakat, unit produksi dan perdagangan roemah tenun tijarah, unit penyewaan sound system dan unit penjualan santan murni. Yang kini menjadi fokus penulis ialah unit

produksi dan perdagangan roemah tenun tijarah karna unit tersebut telah menerapkan QRIS dari tahun 2023. Hal itu menjadikan penerapan QRIS di BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk menjadi langkah awal dalam digitalisasi sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan desa. Namun, penggunaan QRIS di tingkat desa tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam aspek kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta pemahaman terhadap risiko transaksi digital. Oleh karena itu, BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk menjadi studi kasus yang relevan dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem pembayaran digital diimplementasikan oleh pelaku ekonomi di desa. Maka penelitian ini berfokus untuk mengkaji dua aspek penting, yaitu penerapan penggunaan QRIS dan pencegahan *fraud* yang mungkin terjadi selama implementasinya di BUMDes Kuala Alam dan Bumdes sebauk.

Pentingnya kajian ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan desa. Dalam sebuah laporan yang dimuat di (Riau1.com, 2024) disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Bank Indonesia Perwakilan Riau berkomitmen mengoptimalkan fasilitas pendukung implementasi QRIS, termasuk pada level desa dan UMKM. Komitmen tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap penyebaran teknologi pembayaran digital secara menyeluruh, termasuk ke wilayah pedesaan yang masih dalam tahap adaptasi terhadap teknologi. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam memastikan bahwa implementasi QRIS tidak hanya bersifat simbolik, namun juga fungsional dan aman bagi masyarakat desa.

Penelitian ini menjadi urgen dilakukan mengingat pentingnya sistem pembayaran digital yang aman dan efektif untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan. Dengan memahami Penerapan penggunaan QRIS dan Pencegahan *fraud* dalam implementasinya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi strategis dalam pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dengan melihat peluang serta tantangan yang ada, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana kesiapan dan pelaku ekonomi desa terhadap penggunaan QRIS, sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi *fraud* yang mungkin terjadi selama proses implementasinya. Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital bukan hanya soal efisiensi dan kecepatan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kepercayaan, keamanan data, serta pemahaman teknologi yang menjadi tantangan tersendiri di lingkungan desa.

Kondisi literasi digital dan keuangan yang masih terbatas, serta infrastruktur yang belum merata, menjadi faktor yang turut memengaruhi tingkat keberhasilan digitalisasi. Apabila tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, maka implementasi QRIS yang seharusnya membawa kemudahan justru bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan atau *fraud*. Selain itu, penting pula untuk melihat sejauh mana pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak Bank Indonesia ikut berperan dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat desa dalam menggunakan teknologi keuangan digital secara aman dan bijak.

Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem pembayaran digital, manajemen risiko, dan ekonomi desa, tetapi juga bernilai praktis sebagai acuan bagi penyusunan kebijakan dan strategi pendampingan implementasi QRIS di desa-desa lainnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika di lapangan, serta menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, digitalisasi keuangan desa melalui QRIS benar-benar dapat menjadi solusi yang inklusif, aman, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh. Pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang adopsi teknologi tetapi juga tentang membangun ekosistem yang mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat desa secara menyeluruh.

Studi mengenai QRIS selama ini cenderung berfokus pada implementasinya di sektor UMKM perkotaan, sementara penelitian yang membahas penggunaan QRIS di BUMDes, terutama dari sudut pandang pencegahan *fraudnya*, masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang perlu diisi guna memperkuat fondasi digitalisasi desa, baik secara praktis maupun akademis. Berdasarkan Faisol dkk (2025) melakukan penelitian tentang kecurangan di BUMDes dan menekankan bahwa faktor utama yang menyebabkan kecurangan adalah kurangnya transparansi dan pengawasan. Namun, penelitian belum membahas peran sistem pembayaran digital seperti QRIS dalam mencegah penipuan digital. Selain itu, penipuan digital seperti pemalsuan kode QR atau penyalahgunaan data masih jarang diteliti, terutama di BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah dengan menyelidiki penerapan penggunaan QRIS dalam Pencegahan *fraud* di BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam Pencegahan *Fraud*: Studi Kasus BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam kegiatan transaksi di BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk?
2. Apa saja bentuk potensi *fraud* yang mungkin terjadi meskipun menggunakan QRIS pada kedua BUMDes tersebut?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk dalam mencegah terjadinya *fraud* selama penerapan QRIS?
4. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk dalam mengimplementasikan QRIS?
5. Apakah terdapat temuan indikasi *fraud* selama proses penerapan QRIS di BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk?

6. Apakah regulasi penggunaan QRIS sudah cukup komprehensif dalam meminimalisir terjadinya *fraud* di kedua BUMDes tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah di kemukakan, Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana penerapan penggunaan QRIS dalam kegiatan transaksi di BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi *fraud* yang dapat terjadi meskipun menggunakan QRIS di kedua BUMDes tersebut.
3. Menganalisis upaya pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk selama penerapan QRIS.
4. Menjelaskan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi QRIS pada BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk.
5. Mengungkap apakah terdapat temuan *fraud* dalam penggunaan QRIS selama proses implementasinya di kedua BUMDes tersebut.
6. Mengungkap apakah regulasi penggunaan QRIS sudah cukup komprehensif dalam meminimalisir terjadinya *fraud* di kedua BUMDes tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan system pembayaran digital melalui QRIS serta upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan BUMDes.
2. Bagi BUMDes Kuala Alam dan BUMDes Sebauk, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam mengoptimalkan penggunaan QRIS serta Menyusun strategi pencegahan fraud guna meningkatkan efektivitas dan keamanan transaksi digital.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain, penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman mengenai praktik digitalisasi transaksi keuangan di tingkat desa melalui QRIS, serta gambaran nyata mengenai tantangan implementasi dan upaya pencegahan fraud dalam konteks BUMDes.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada penerapan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital dalam kegiatan operasional BUMDes Kuala Alam pada unit Perdagangan dan Jasa dan BUMDes Sebauk pada unit Produksi dan Perdagangan yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan QRIS dijalankan, potensi *fraud* yang mungkin terjadi, strategi pencegahan *fraud* yang diterapkan oleh kedua BUMDes, serta kendala yang dihadapi selama proses implementasi QRIS. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis sistem QRIS secara nasional maupun persepsi konsumen atau masyarakat umum terhadap penggunaannya.